



PENERAPAN PSAP 13 PADA ASET TETAP PUSKESMAS X DALAM PROSES AUDIT OLEH KAP XY

Ramlah^{*1}, Rahmat Zuhdi²

^{1,2} Universitas Trunodjoyo Madura, Jawa Timur, Indonesia

^{*}Corresponding Author: ramlahlah260103@gmail.com

Info Article	Abstract: <i>This study aims to analyze the implementation of PSAP 13 on fixed assets at Puskesmas X during the audit process conducted by KAP XY. The study used a descriptive qualitative approach through field observation, document review, and analysis of audit working papers during the internship program at KAP XY. The focus of the study was directed toward the presentation, classification, depreciation, reconciliation, and disclosure of fixed assets in financial statements. The results indicate that fixed assets require special attention because they are material accounts related to accountability in public sector entities. The audit process emphasized physical inspection, reconciliation procedures, depreciation analysis, and disclosure evaluation. In addition, this study provides an understanding regarding the importance of orderly fixed asset administration in supporting fair financial statement presentation based on PSAP 13.</i> Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAP 13 pada aset tetap Puskesmas X dalam proses audit yang dilakukan oleh KAP XY. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, telaah dokumen, dan analisis kertas kerja audit selama kegiatan magang di KAP XY. Fokus penelitian diarahkan pada penyajian, klasifikasi, penyusutan, rekonsiliasi, dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tetap memerlukan perhatian khusus karena merupakan akun material yang berkaitan dengan akuntabilitas entitas sektor publik. Proses audit menekankan pemeriksaan fisik, prosedur rekonsiliasi, analisis penyusutan, serta evaluasi pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya tertib administrasi aset tetap dalam mendukung kewajaran penyajian laporan keuangan berbasis PSAP 13.
Received : 01 April 2026 Revised : 02 Mei 2026 Accepted : 03 Juni 2026 Publication : 30 Juni 2026	
Keywords: PSAP 13, Fixed Assets, Audit, Depreciation, Financial Statements.	
Kata Kunci: PSAP 13, Aset Tetap, Audit, Penyusutan, Laporan Keuangan.	
Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	

INTRODUCTION

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan primer masyarakat merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional. Dalam menjalankan fungsi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, serta pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas sangat bergantung pada ketersediaan aset tetap yang terkelola dengan baik. Aset tersebut tidak terbatas pada gedung dan prasarana, tetapi juga mencakup alat kesehatan yang memerlukan perawatan khusus, kendaraan operasional untuk layanan keliling, perangkat teknologi informasi, serta peralatan pendukung administrasi.

Sebagai sumber daya publik yang memiliki nilai material tinggi, aset tetap menjadi prasyarat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Sebaliknya, pengelolaan aset tetap yang tidak tertib, seperti ketidakjelasan status kepemilikan, pencatatan yang tidak akurat, atau pemeliharaan yang terabaikan, dapat berdampak langsung pada terganggunya operasional pelayanan serta menurunkan kualitas informasi keuangan publik. Dalam konteks akuntabilitas institusional, kondisi tersebut berpotensi melemahkan kepercayaan stakeholder terhadap pengelolaan keuangan negara di tingkat unit pelayanan terdepan (A. Sujaya et al., 2020).

Di tengah transformasi tata kelola pemerintahan menuju prinsip transparansi dan akuntabilitas, entitas sektor publik di Indonesia telah menggeser paradigma penyusunan laporan keuangan dari basis kas menuju basis akrual. Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjadi dasar bagi seluruh entitas pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap dijabarkan lebih lanjut dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pelepasan aset.

Selain itu, penyajian laporan keuangan bagi entitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), termasuk Puskesmas, diatur melalui PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Standar tersebut menuntut penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan informatif, meliputi Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan demikian, penerapan PSAP 13 pada aset tetap Puskesmas bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa aset publik tercatat, dinilai, dan diungkapkan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan (Mardiasmo, 2018).

Meskipun regulasi mengenai akuntansi aset tetap telah diatur secara rinci, penerapannya pada pemerintah daerah dan unit pelayanan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis. A. Sujaya et al. (2020) menjelaskan bahwa pengelolaan aset tetap pemerintah daerah masih mengalami permasalahan pada aspek inventarisasi, pencatatan, dan rekonsiliasi aset. Kondisi tersebut diperparah pada unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas yang lebih berfokus pada pelayanan medis sehingga pengelolaan administrasi aset sering kali menjadi perhatian sekunder. G. A. Adam & Kapojos (2023) menyatakan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap merupakan salah satu area penting dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Yuliana & Hasibuan (2022) menjelaskan bahwa ketepatan pengakuan awal, penentuan umur manfaat, dan perhitungan penyusutan aset tetap sangat memengaruhi kewajaran nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan. Kesalahan dalam salah satu komponen tersebut dapat menyebabkan distorsi nilai aset serta memengaruhi laporan operasional pemerintah daerah.

Dalam proses audit laporan keuangan sektor publik, aset tetap merupakan akun yang memerlukan perhatian khusus karena memiliki nilai material, masa manfaat jangka panjang, dan kompleksitas estimasi akuntansi. Kesalahan pencatatan aset tetap dapat berdampak terhadap integritas laporan keuangan, baik pada neraca, laporan operasional, maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Oleh karena itu, auditor perlu melakukan prosedur pemeriksaan yang komprehensif, meliputi verifikasi keberadaan fisik aset, penelaahan klasifikasi dan hak kepemilikan aset, pengujian penyusutan, rekonsiliasi data fisik dengan catatan administrasi, serta evaluasi kecukupan pengungkapan sesuai ketentuan PSAP 13 (Mulyadi, 2015). Pemeriksaan aset tetap tidak hanya berfokus pada dokumen administrasi, tetapi juga pada kesesuaian kondisi fisik aset dengan catatan akuntansi yang dimiliki entitas (Nurohman et al., 2025).

Kegiatan magang pada KAP XY memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami secara langsung proses audit sektor publik, khususnya pada pemeriksaan aset tetap Puskesmas X. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktik audit lapangan, tetapi juga memahami penerapan PSAP 07 dan PSAP 13 dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui kontribusi akademik terhadap peningkatan tata kelola administrasi dan pelaporan keuangan sektor publik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAP 13 pada aset tetap Puskesmas X dalam proses audit yang dilakukan oleh KAP XY. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengelolaan aset tetap pada Puskesmas X, menganalisis kesesuaian penyajian, klasifikasi, penyusutan, rekonsiliasi, dan pengungkapan aset tetap terhadap ketentuan PSAP 07 dan PSAP 13, serta mengidentifikasi hambatan administratif dan teknis dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan pada entitas sektor publik.

METHOD

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan bentuk studi kasus (case study). Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada karakteristik fenomena yang dikaji, yaitu penerapan standar akuntansi sektor publik dalam praktik audit lapangan yang bersifat kontekstual dan kompleks. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran secara mendalam mengenai proses audit aset tetap, identifikasi temuan administrasi, serta kesesuaian praktik lapangan dengan ketentuan PSAP 07 dan PSAP 13. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan audit lapangan sehingga tercipta integrasi antara pengembangan kompetensi akademik dan kontribusi praktis terhadap tata kelola keuangan sektor publik.

Kegiatan magang dan pengabdian dilaksanakan di KAP XY yang menugaskan tim audit untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan Puskesmas X. Lokasi kegiatan mencakup kantor KAP XY sebagai tempat perencanaan audit, penelaahan kertas kerja audit, dan diskusi dengan auditor, serta kantor Puskesmas X sebagai lokasi observasi lapangan dan pemeriksaan fisik aset tetap. Kegiatan berlangsung selama periode magang dengan mengikuti tahapan audit mulai dari perencanaan (planning), pelaksanaan prosedur pemeriksaan lapangan (fieldwork), hingga penyusunan dokumentasi dan temuan audit.

Objek dalam kegiatan ini adalah akun aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan Puskesmas X pada periode yang diperiksa. Fokus kegiatan diarahkan pada lima aspek utama yang berkaitan dengan penerapan PSAP 07 dan PSAP 13, yaitu: (1) penyajian aset tetap dalam laporan keuangan; (2) klasifikasi aset tetap berdasarkan kelompok dan jenis aset; (3) perhitungan penyusutan aset tetap; (4) rekonsiliasi antara data fisik aset dengan catatan administrasi; dan (5) pengungkapan aset tetap dalam

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kelima aspek tersebut dipilih karena merupakan area penting dalam audit sektor publik dan berkaitan langsung dengan kualitas pengelolaan aset tetap pemerintah daerah.

Sumber data dalam kegiatan ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang serta diskusi dengan auditor KAP XY terkait prosedur pemeriksaan aset tetap. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan Puskesmas X, daftar aset tetap dan Kartu Inventaris Barang (KIB), kertas kerja audit, kebijakan akuntansi entitas, serta peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik dan audit aset tetap.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan telaah dokumen audit. Observasi dilakukan dengan mengikuti proses audit lapangan, termasuk pemeriksaan fisik aset tetap dan penyusunan kertas kerja audit. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan catatan lapangan, dokumentasi kegiatan, serta data administrasi yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, telaah dokumen audit dilakukan terhadap dokumen pendukung aset tetap, perhitungan penyusutan, hasil rekonsiliasi, dan catatan temuan audit yang berkaitan dengan penerapan PSAP 13.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, dokumen audit, dan hasil diskusi dengan auditor KAP XY. Selain itu, dilakukan pemeriksaan sejawat melalui diskusi dengan dosen pembimbing dan auditor senior untuk meminimalkan bias interpretasi data. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara deskriptif berdasarkan fokus penelitian, yaitu penyajian, klasifikasi, penyusutan, rekonsiliasi, dan pengungkapan aset tetap sesuai ketentuan PSAP 07 dan PSAP 13.

Mengingat kegiatan ini dilaksanakan dalam lingkungan profesi audit yang terikat oleh prinsip kerahasiaan (confidentiality), seluruh proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan memperhatikan etika akademik dan kode etik profesi akuntan publik. Oleh karena itu, identitas Puskesmas X dan KAP XY disamarkan dalam artikel ini untuk menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen audit yang digunakan dalam kegiatan pengabdian.

RESULTS AND DISCUSSION

Gambaran Umum Aset Tetap Puskesmas X

Puskesmas X merupakan unit pelayanan kesehatan masyarakat di bawah pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Sebagai entitas sektor publik, Puskesmas X memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan yang tertib, termasuk dalam pengelolaan aset tetap yang digunakan untuk mendukung operasional pelayanan kesehatan. Aset tetap yang dimiliki meliputi tanah, gedung dan bangunan, kendaraan operasional, peralatan medis, komputer, serta peralatan kantor lainnya. Keberadaan aset tersebut tidak hanya menjadi sarana operasional pelayanan kesehatan, tetapi juga merepresentasikan investasi publik yang harus dijaga keberadaan, kondisi, dan nilainya demi mendukung pelayanan yang berkelanjutan.

Dalam laporan keuangan tahun 2025, akun aset tetap menjadi salah satu pos yang memperoleh perhatian khusus dari tim audit KAP XY karena memiliki nilai yang material dibandingkan dengan total aset keseluruhan. Berdasarkan hasil audit, komposisi aset tetap Puskesmas X disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Aset Tetap Puskesmas X Tahun 2025

Aspek	Nominal
Harga Perolehan	Rp. 9.523.389.403,11
Akumulasi Penyusutan	Rp. 5.863.127.293,24
Nilai Buku Aset Tetap	Rp. 3.660.262.109,87
Beban Penyusutan Tahun Berjalan	Rp. 324.134.068,74

Sumber: Data Audit Puskesmas X Tahun 2025.

Nilai buku aset tetap yang material menunjukkan bahwa akun ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan dan menjadi fokus utama dalam proses audit sektor publik. Pemeriksaan aset tetap tidak hanya berfokus pada verifikasi dokumen administrasi, tetapi juga mencakup inspeksi fisik untuk memastikan keberadaan aset dan kesesuaiannya dengan catatan akuntansi (Nurohman et al., 2025). Dalam kegiatan magang ini, mahasiswa turut mendampingi auditor dalam melakukan observasi awal terhadap daftar aset tetap dan pemetaan lokasi fisik aset di lingkungan Puskesmas X.

Penerapan PSAP 13 pada Penyajian dan Pengakuan Aset Tetap

Penerapan PSAP 13 pada aset tetap Puskesmas X tercermin dalam penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Dalam neraca, aset tetap disajikan secara terpisah antara harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset. Penyajian tersebut

sesuai dengan ketentuan PSAP 07 dan PSAP 13 yang mengharuskan aset tetap dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sehingga dapat mencerminkan nilai aset secara lebih wajar (KSAP, 2015). Selain penyajian di neraca, Puskesmas X juga telah mengakui beban penyusutan dalam Laporan Operasional sebesar Rp324.134.068,74. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa entitas telah menerapkan konsep akuntansi berbasis akrual melalui pengalokasian nilai aset selama masa manfaatnya. Yuliana & Hasibuan (2022) menjelaskan bahwa ketepatan pengakuan dan perhitungan penyusutan sangat memengaruhi kewajaran nilai aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan. Tanpa pengakuan penyusutan yang tepat, nilai buku aset dapat mengalami overstatement dan berpotensi memengaruhi kualitas informasi keuangan sektor publik.

Hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh tim audit menunjukkan bahwa sebagian besar aset tetap telah dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Serah Terima (BAST), dan dokumen pembayaran. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi bukti awal yang mendukung legalitas kepemilikan dan kewajaran harga perolehan aset. Namun demikian, masih ditemukan beberapa aset, khususnya peralatan kantor dan komputer, yang memerlukan penyempurnaan administrasi dan pencatatan aset. Temuan ini sejalan dengan penelitian A. Sujaya et al. (2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan aset tetap pemerintah daerah masih menghadapi kendala pada aspek inventarisasi dan rekonsiliasi data.

Pemeriksaan Fisik dan Rekonsiliasi Aset Tetap

Dalam pelaksanaan audit lapangan, tim KAP XY melakukan pemeriksaan terhadap daftar aset tetap, dokumen perolehan aset, serta inspeksi fisik terhadap sampel aset di lingkungan Puskesmas X. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan keberadaan aset, ketepatan klasifikasi aset, serta kesesuaian antara kondisi fisik aset dengan catatan administrasi.



Gambar 1. Kegiatan Observasi Fisik Aset Tetap

Rekonsiliasi aset tetap menjadi prosedur penting dalam audit untuk memastikan kesesuaian antara data fisik aset, daftar inventaris, dan catatan akuntansi. A. Sujaya et al. (2020) menjelaskan bahwa rekonsiliasi yang tidak dilakukan secara berkala dapat menyebabkan perbedaan antara aset yang tercatat dengan aset yang sebenarnya dimiliki entitas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa secara umum aset berupa gedung, kendaraan operasional, dan peralatan medis memiliki kesesuaian antara data fisik dan catatan administrasi. Namun, untuk beberapa aset bergerak seperti komputer dan peralatan kantor, ditemukan ketidaksesuaian lokasi fisik dengan data inventaris serta adanya aset yang belum dicatat dalam daftar aset tetap meskipun telah digunakan dalam kegiatan operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal atas mutasi dan pencatatan aset masih perlu diperkuat. (Mulyadi, 2015) menyatakan bahwa pemeriksaan fisik aset merupakan prosedur audit yang penting karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pengelolaan aset pemerintah. Dalam kegiatan ini, mahasiswa turut membantu auditor dalam penyusunan working paper sederhana terkait hasil observasi dan temuan rekonsiliasi aset tetap.

Analisis Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap menjadi salah satu fokus penting dalam proses audit karena memengaruhi nilai buku aset pada neraca dan beban operasional dalam laporan operasional. Berdasarkan hasil telaah kertas kerja audit, Puskesmas X menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) dalam menghitung penyusutan aset tetap.

Tabel 3. Analisis Penyusutan Aset Tetap

Aspek	Hasil Temuan
Metode Penyusutan	Garis Lurus
Pengakuan Beban Penyusutan	Telah dilakukan secara konsisten
Rekonsiliasi Penyusutan	Telah diuji ulang oleh auditor
Dampak terhadap Neraca	Memengaruhi nilai buku aset
Dampak terhadap Laporan Operasional	Memengaruhi beban operasional

Sumber: Kertas Kerja Audit Tahun 2025.

Metode garis lurus digunakan karena menghasilkan alokasi beban penyusutan yang relatif stabil selama masa manfaat aset. Secara umum, perhitungan penyusutan dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Manfaat}}$$

G. A. Adam & Kapojos (2023) menjelaskan bahwa penyusutan merupakan proses alokasi sistematis nilai aset selama masa manfaatnya sehingga memengaruhi laporan

operasional dan nilai buku aset dalam neraca. Berdasarkan hasil pengujian ulang yang dilakukan auditor, perhitungan penyusutan pada Puskesmas X secara umum telah sesuai dengan ketentuan PSAP 07. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam menentukan estimasi umur manfaat beberapa aset medis yang mengalami penurunan fungsi akibat perkembangan teknologi kesehatan. Nurohman et al. (2025) menjelaskan bahwa kesalahan dalam menetapkan estimasi masa manfaat dapat menyebabkan nilai buku aset tidak mencerminkan kondisi ekonomis sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap estimasi umur manfaat aset medis agar nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan tetap relevan dan andal.

Pengungkapan Aset Tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pengungkapan aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian penting dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan sektor publik (KSAP, 2015). PSAP 13 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi mengenai kebijakan akuntansi aset tetap, rincian aset berdasarkan kelompok, metode penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset. Hasil audit menunjukkan bahwa Puskesmas X telah mengungkapkan sebagian besar informasi wajib terkait aset tetap dalam CaLK. Kebijakan akuntansi aset tetap, metode penyusutan, dan rincian aset telah dijelaskan dalam laporan keuangan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa bagian yang memerlukan penyempurnaan, terutama terkait rincian aset per kelompok dan pengungkapan status legalitas beberapa aset tetap.

Selain itu, pengungkapan mengenai rencana pemeliharaan besar dan evaluasi masa manfaat aset medis belum dijelaskan secara rinci. Padahal, informasi tersebut penting untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan keberlanjutan pemanfaatan aset publik. (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa laporan keuangan sektor publik tidak hanya harus memenuhi aspek formal penyajian, tetapi juga harus mampu memberikan informasi yang relevan dan transparan bagi pengguna laporan keuangan. Dalam kegiatan pengabdian ini, mahasiswa bersama auditor menyusun rekomendasi penyempurnaan format CaLK yang disesuaikan dengan ketentuan PSAP 13, khususnya terkait pengungkapan rincian aset tetap dan evaluasi masa manfaat aset medis.

Implikasi Pengabdian

Kegiatan pengabdian melalui program magang di KAP XY memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, yaitu Puskesmas X, KAP XY, dan mahasiswa. Bagi

Puskesmas X, kegiatan ini memberikan masukan terkait penyempurnaan administrasi dan pencatatan aset tetap, termasuk pembaruan data inventaris, penyesuaian klasifikasi aset, dan penyempurnaan pengungkapan dalam CaLK. Bagi KAP XY, kolaborasi dengan mahasiswa memberikan dukungan akademik dalam memahami penerapan PSAP 07 dan PSAP 13 pada audit sektor publik.

Sementara itu, bagi mahasiswa, kegiatan ini memberikan pengalaman praktik mengenai proses audit aset tetap sektor publik, mulai dari pemeriksaan fisik, rekonsiliasi data, pengujian penyusutan, hingga evaluasi pengungkapan laporan keuangan. Pengalaman tersebut membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai penerapan akuntansi pemerintahan dan audit sektor publik secara langsung di lapangan. Secara lebih luas, kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, Kantor Akuntan Publik, dan entitas sektor publik dapat mendukung peningkatan tata kelola keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan aset tetap yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

CONCLUTION

Berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan melalui kegiatan magang di KAP XY dan keterlibatan dalam proses audit laporan keuangan Puskesmas X, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAP 13 pada aset tetap secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik. Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan berbasis akrual telah memenuhi ketentuan standar melalui pemisahan harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset dalam neraca. Selain itu, pengakuan beban penyusutan dalam Laporan Operasional menunjukkan bahwa Puskesmas X telah menerapkan prinsip akuntansi akrual dalam pengelolaan aset tetap sektor publik.

Proses audit yang dilakukan oleh KAP XY menekankan pemeriksaan dokumen aset, inspeksi fisik, rekonsiliasi data administrasi, pengujian penyusutan, serta evaluasi pengungkapan aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hasil audit menunjukkan bahwa sebagian besar aset tetap telah didukung dokumen administrasi yang memadai dan dicatat sesuai harga perolehan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala administratif, seperti ketidaksesuaian lokasi aset bergerak, belum optimalnya pengungkapan aset dalam CaLK, dan perlunya evaluasi estimasi umur manfaat beberapa aset medis. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian A. Sujaya et al. (2020) yang menyatakan bahwa tertib administrasi aset tetap menjadi faktor penting dalam mendukung akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, Kantor Akuntan Publik, dan entitas sektor publik dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola keuangan pemerintah daerah. Melalui kegiatan magang, mahasiswa memperoleh pengalaman praktik audit sektor publik secara langsung sekaligus berkontribusi dalam proses evaluasi pengelolaan aset tetap berbasis PSAP 07 dan PSAP 13. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap yang tertib, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas laporan keuangan serta meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, G. A., & Kapojos, P. (2023). PENERAPAN PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4), 144–151. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.50874>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). *PSAP NOMOR 07: AKUNTANSI ASET TETAP*. Diambil dari <https://www.ksap.korg/standar/PSAP07.pdf>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2015). *PSAP NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BLU*. Diambil dari <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2012/08/PSAP-13-PLK-BLU-Ver-PMK-217.pdf>
- Nurohman, M., Astriani, D., & Rachpriliani, A. (2025). ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO. 07 TENTANG ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KARAWANG. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 8(3), 2441–2450. <https://doi.org/10.31539/costing.v8i3.15236>
- Sujaya, F., Yanti, Y., & Wibowo, R. (2020). PENERAPAN PSAP NOMOR 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG. *ProBank*, 5(2), 157–166. <https://doi.org/10.36587/probank.v5i2.722>
- Yuliana, Y., & Hasibuan, N. F. A. (2022). ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 07 TENTANG ASET TETAP PADA KANWIL DJKN SUMATERA UTARA.

Jurnal Akuntansi AKTIVA, 3(2), 177–183.

<https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3045>

Mardiasmo. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK: Edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Mulyadi. (2015). *AUDITING (6th ed.)*. Salemba Empat.